

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Masalah masih lemahnya resiliensi bencana adalah isu yang tinggi urgensinya di Indonesia karena tingginya potensi kerusakan yang terjadi apabila dilanda bencana, yang mana datang dalam frekuensi yang tinggi pula karena kondisi geografis Indonesia. Hal ini benar terutama pada bencana gempa bumi dan tsunami dimana sesuai data yang sudah disajikan diatas, Indonesia bisa dibilang sebagai salah satu korban terburuk bencana gempa bumi dan tsunami diseluruh dunia.

Dalam upayanya untuk mengembangkan resiliensi bencana tidaklah hanya melalui upaya domestik Indonesia saja tetapi terdapat juga faktor eksternal dalam bentuk bantuan luar negeri yang berkontribusi. Faktanya adalah Jepang selaku negara dengan teknologi paling mutakhir di bidang resiliensi bencana dan juga salah satu pendonor bantuan luar negeri dengan jumlah terbesar di Indonesia kerap memberikan komitmennya untuk membantu mengembangkan resiliensi bencana indonesia sebagai bagian dari kepentingan Jepang untuk mendorong implementasi konsep *Build Back Better* secara global, yang mana paling belakangan ini Jepang suarakan pada forum bilateral “Indonesia-Japan 2045”.

Di Indonesia, terkait penerapan *Build Back Better* pada bantuan luar negeri yang diberikan oleh Jepang dalam periode 2015-2019, telah dilakukan implementasi pasca terjadinya Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi Tengah tahun 2018. Di Sulawesi Tengah terdapat 3 proyek sebagai bagian dari program untuk mendorong konsep *Build Back Better* yakni melalui 1) rekonstruksi Jembatan 4 Palu dengan desain/cetak biru tahan bencana milik Jepang, yang mana diberikan sebagai *project aid & technical assistance* melalui bantuan hibah; 2) *Infrastructure Reconstruction Sector Loan in Central Sulawesi (IRSL)* sebagai bantuan rekonstruksi infrastruktur vital lainnya seperti pembangunan kembali rumah sakit dan sekolah di sekitar kawasan Palu, Sigi, dan Donggala, namun kali

ini lebih tahan bencana, yang mana diberikan sebagai *project aid & technical assistance* melalui dana pinjaman ODA; 3) *The Project for development of Regional Disaster Risk Resilience Plan in Central Sulawesi* yang mana merupakan pengembangan aspek *non-tangible* dalam resiliensi bencana yang mencakup diantaranya pemetaan zona rawan bencana (ZRB), peninjauan keamanan titik-titik relokasi, pembangunan hunian sementara (huntara), dan perencanaan tata ruang serta asesmen bahaya.

Namun sayangnya, dalam implementasinya masih terdapat kendala yang bersifat lokal. Hal ini terutama terlihat pada proses rekonstruksi Jembatan 4 Palu. Kendala seperti kurangnya koordinasi antara pemerintah nasional dengan pemerintah daerah Indonesia yang menyebabkan ketidakmampuan untuk memulai rekonstruksi sesuai dengan *timeline* yang sudah dijadwalkan serta masalah sosioekonomi di kawasan tersebut yang menjadi pemicu tersendatnya rekonstruksi. Padahal disisi lain Jepang melalui JICA sudah memenuhi kewajibannya pada beban yang ditanggungkan Jepang untuk memberikan bantuan luar negeri berprinsip *Build Back Better* baik itu melalui pengadaan material dan peralatan baik impor maupun lokal, pemberian dana hibah untuk kepentingan rekonstruksi, serta pengadaan desain/cetak biru infrastruktur berdasarkan prinsip *Build Back Better*.

Hal ini bukan berarti tidak terdapat hasil konkrit dari implementasi *Build Back Better* oleh Jepang di Sulawesi Tengah. Faktanya adalah Jepang telah memenuhi setengah dari tanggung jawabnya berkaitan dengan rekonstruksi Jembatan 4 Palu yakni melalui penyusunan *masterplan* rekonstruksi dan rehabilitasi, penyusunan desain/cetak biru jembatan tahan bencana, serta pengadaan material dan peralatan untuk kepentingan rekonstruksi. Jepang pun hanya perlu menunggu Indonesia memenuhi tanggung jawabnya agar bisa secara penuh menyelesaikan proses rekonstruksi. Selain itu untuk bentuk implementasi lainnya seperti *The Project for development of Regional Disaster Risk Resilience Plan in Central Sulawesi* telah rangkup sesuai dengan *timeline* yang ditentukan. Sementara untuk *Infrastructure Reconstruction Sector Loan in Central Sulawesi* (IRSL), pinjaman dana ODA sudah turun dan tahap awal rencana rekonstruksi telah dimulai yakni melalui

Pembangunan Gedung AMC Rumah Sakit Anutapura. Selain itu, dialog antara JICA dengan pihak pemangku kepentingan di Indonesia kerap dilaksanakan untuk memantau kemajuan proyek rekonstruksi Jembatan 4 Palu.

Pada akhirnya, melalui implementasi *Build Back Better* di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari pemberian bantuan luar negeri Jepang akan didapatkan pengaruh berupa 1) peningkatan kualitas infrastruktur dan sistem manajemen agar lebih tahan terhadap bencana kedepannya di wilayah Sulawesi Tengah; 2) menjadi model untuk implementasi *Build Back Better* secara mandiri oleh Indonesia; 3) merevitalisasi komunitas lokal yang terkena bencana; 4) membantu menciptakan masyarakat sadar bencana; dan 5) mendukung jalannya berbagai rencana tingkat atas nasional Indonesia baik itu melalui membantu kembali berjalannya Rencana Pembangunan Nasional ke-3 (2015-2019) yang telah terinterupsi akibat bencana, maupun menjadi *proof of concept* bagi ide yang tertuang dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019 yakni terkait pembangunan kembali yang lebih baik.

6.2 Saran

Masalah yang paling dasar adalah diperlukan adanya perluasan wawasan terhadap konsep pengurangan risiko bencana, mitigasi bencana, dan resiliensi bencana pada masyarakat Indonesia. Ini karena masalah ini adalah yang paling mendasar dan menjadi biang timbulnya masalah lain. Dengan adanya perubahan *mindset* pada seluruh warga dengan menanamkan kepentingan terhadap pengurangan kerusakan dari bencana dengan segala cara maka inisiatif-inisiatif lain yang berusaha diimplementasikan secara domestik maupun proses pemberian bantuan luar negeri seperti diatas dapat lebih mudah dilaksanakan. Hal ini adalah seperti yang terjadi di Jepang yang mana sangat terkenal akan masyarakatnya yang memiliki kesamaan *mindset* pada beberapa aspek seperti etos kerja. Namun tentu saja tidaklah realistis untuk mengharapkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia dapat menerima edukasi terkait wawasan resiliensi bencana dalam waktu singkat, terutama karena ketidakmungkinan logistiknya. Sebagai gantinya, proses bisa

dilakukan secara perlahan-lahan dengan prioritas diberikan pada pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah.

Disisi JICA dan implementasi *Build Back Better* dalam bantuan luar negeri, perlu dilakukan pemaparan yang lebih komprehensif dan transparan terhadap khalayak umum terkait sistematika dipilihnya lokasi pasca bencana sebagai subyek implementasi bantuan luar negeri berprinsip *Build Back Better*. Dengan seperti itu dapat terlihat mengapa satu lokasi menerima bantuan teknis dan teknologi seperti *Build Back Better* dan mengapa lokasi lain tidak padahal kedua lokasi sama-sama mendapatkan bantuan luar negeri dari Jepang melalui JICA. Selain itu dengan ketransparanan terhadap prioritas Jepang dan JICA dalam implementasi *Build Back Better* dapat mempermudah penelitian terkait topik ini kedepannya.